

Analisis kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :
Noor Indah Fitriany
NIM E. 0005235

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

NOOR INDAH FITRIANY

NIM E. 0005235

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Mohammad Adnan S.H.,M.Hum

NIP. 195407121984031002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh

NOOR INDAH FITRIANY

NIM : E. 0005235

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Oktober 2009

DEWAN PENGUJI

1. Mohammad Adnan S.H.,M.Hum :
195407121984031002
2. Agus Rianto S.H.,M.Hum :
196108131989031002
3. Bambang Joko Sudibyo S.H.,M.H :
195310051986101001

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

NAMA : NOOR INDAH FITRIANY

NIM : E. 0005235

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2009
Yang Membuat Pernyataan

NOOR INDAH FITRIANY
NIM E. 0005235

ABSTRAK

NOOR INDAH FITRIANY. E 0005235. ANALISIS KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2009.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah surat wasiat dalam Islam, bagaimanakah pembagian harta warisan dalam Islam, dan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang –

undangan yang terkait dengan masalah wasiat dan pembagian harta warisan. Peraturan perundang – undangan yang dijadikan dasar adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III Bab XIII tentang Surat Wasiat. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. *Kedua*, bahwa pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga. *Ketiga*, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam, karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti judi, mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya.

Kata kunci : Hukum Islam, Wasiat, Hukum Waris (Faraidh)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul : “ANALISIS KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum. selaku Ketua bagian Hukum dan Masyarakat serta selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan ilmu-ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Ibu S.W. Yulianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga dapat penulis amalkan untuk kedepannya.
5. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
6. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuannya kepada penulis dalam mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan hukum ini.
7. Kedua orang tua yang tercinta, Terima kasih untuk segala kasih sayang, pengorbanan, doa, arahan, dukungan, dan semangat yang tak henti-hentinya yang tidak akan mungkin mampu penulis balas.
8. Charis, Neni dan Arga terima kasih untuk semua kasih sayang, keceriaan, masukan, kritikan, ejekan dan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Adikku, Malia Tada Noras yang selalu jadi tempat curhat aku, mensupport aku dan tempat berbagi duka maupun keceriaan.
10. Ataqi yang selalu bikin pusing dan Irtada (jabri jubrol) pipi gombol yang sok imut dan selalu tebar pesona (I Love U Full Ampe tumpah)
11. Miss Bosy bikin emosi dan miss diktator bikin bibir jontor (Abuela) yang selalu mewarnai kehidupanku.

12. Teman-temanku Mbak Na, Indra, Ayu Nononk, Gigusa Ella, Nophek, Irma Permata, Intan, Sinta, Pepti, Fahmi, Fenti, Faisal, Indri, Febri, Yunika, Ronny, Pekik, Elisa, Irma Nurjanah, Anindya, Daniel dan lain-lain terima kasih kalian semua sudah mau menjadi temanku.
13. Teman-teman baikku di SMA : Siti Munawaroh (Cempluk), Endah, Erma, Nene, Endang, Tegas , Dira, dll. Terima kasih atas dukungan dan keceriaannya selama ini.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2005 FH yang telah menjadi teman-teman seperjuangan.
15. Seluruh keluarga besarku yang membuat hidup ini tidak membosankan.
16. MD Entertainment yang telah memberikan ide dan inspirasi kepada penulis dalam menyusun skripsi.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya, hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kadar keilmuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritk, masukan dan saran yang membangun yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia.

Surakarta, Oktober 2009

Penulis

NOOR INDAH FITRIANY

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting , yaitu : waktu ia dilahirkan , waktu ia kawin / menikah , dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah dalam artian sosiologis , ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa , ia akan kawin / menikah. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharmabaktinya yaitu tetap berlangsungnya keturunan. Di dalam bidang Hukum Perkawinan , hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia.

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya di dalam Al-Qur'an. Ide penciptaan manusia itu dikemukakan Allah sebelumnya di depan para malaikat yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Namun Allah SWT mengatakan: *"Aku lebih tahu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui"* (QS.Al-Baqarah:30).

Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang dirisaukan oleh para malaikat itu, Allah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan main dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang tindak tanduk atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupannya. Semua aturan ini bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah sebagaimana yang dirisaukan oleh para malaikat sebelumnya. Hal ini berarti bahwa selama manusia dalam kehidupannya di atas bumi ini mengikuti secara baik aturan yang ditetapkan Allah, kerusakan dan pertumpahan darah tidak akan terjadi. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut syariah atau hukum Syara' yang saat ini disebut dengan hukum Islam.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk

mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, ada yang mengandung sanksi, yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun, ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tetapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut (Amir Syarifudin, 2004: 2).

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.

Dengan demikian terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan daruriyatul al-khamsa (lima kebutuhan dasar) pada diri setiap manusia. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum ibadah'. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga dengan *hablun min Allah*. *Kedua*: berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut "hukum muamalat". Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min annas*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah yang dinyatakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 112 (Amir Syarifudin, 2004: 3).

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan surat wasiat (wasiat) , yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan dan wasiat tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan dan wasiat jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadistnya. Walaupun demikian , penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan dan wasiat.

Masalah warisan dan wasiat seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Begitu juga dengan wasiat, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya , tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkannya, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan dan wasiat , sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain (<http://hak-opsi-dalam->

penyelesaian-hukum-warisan-di-pengadilan-negeri-studi-kasus-di-pengadilan negeri-sle.htm).

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan dan wasiat telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan dan masalah wasiat tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan Negara.

Berdasarkan dari pandangan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tentang warisan dan wasiat terutama dalam pembagian dan pelaksanaannya agar tidak terjadi sengketa yang menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Maka dari itu dalam rangka penulisan hukum dan penyusunan skripsi ini penulis memilih judul : “ANALISIS KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penulisan hukum. Perumusan masalah dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana surat wasiat dalam Islam ?
2. Bagaimana pembagian harta warisan dalam Islam ?
3. Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang dicapai

melalui penelitian ini. Tujuan itu berupa tujuan secara subyektif dan tujuan secara obyektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang hukum islam , khususnya mengenai surat wasiat dalam pembagian warisan menurut hukum islam.
- b. Untuk penyusunan skripsi guna melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana surat wasiat dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan dalam Islam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis , sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode dapat diartikan sebagai suatu penyidikan yang berlangsung dengan rencana tertentu, menempuh suatu usaha untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus ada batas-batasnya sehingga tidak lepas dari kendali (Johnny Ibrahim, 2006: 294). Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pada hakekatnya suatu metodologi itu memberikan pedoman, tentang cara bagaimana seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 2006: 6).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian doktrinal maupun non-doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud, 2008: 33).

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan menurut pandangan hukum Islam. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilihat dari sudut sifatnya dikenal ada tiga jenis yaitu penelitian eksplanatoris, deskriptif dan eksploratoris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama di dalam menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif. Dengan menggunakan sifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doctrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum di antaranya (Peter Mahmud, 2008: 93) :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).
- 2) Pendekatan kasus (Case Approach).
- 3) Pendekatan histories (Historical Approach).
- 4) Pendekatan perbandingan (Comparative Approach).
- 5) Pendekatan konseptual (Conseptual Approach).

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani , sehingga penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III Bab XIII tentang Surat Wasiat sebagai dasar menelaah dan mengkaji masalah yang diangkat (Peter Mahmud, 2008: 94).

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat dan dari studi kepustakaan, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka lainnya disebut dengan data sekunder (Peter Mahmud, 2008: 142).

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data - data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji penulis. Secara umum ciri-ciri dari data sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data
- c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat (Soerjono Soekanto, 2006: 12).

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan. Antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III Bab XIII tentang Surat Wasiat.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang-Undang N0.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang surat wasiat dalam hukum Islam, pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga bahan – bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengelolaan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif (Johnny Ibrahim, 2006: 392).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari isi dan mencatat data yang sesuai dari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel internet, jurnal dan dokumen data-data yang mempunyai kaitan dengan hal surat wasiat dalam Islam, pembagian harta warisan dalam Islam dan juga kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002: 103). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, maka data dianalisis secara silogisme interpretasi, yaitu berupa teknik yang digunakan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Selanjutnya bahan-bahan yang ada dianalisa. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka

sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan , yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian , meliputi latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan penelitian , manfaat penelitian , metode penelitian , jadwal penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan teoritis berdasarkan literature-literatur yang ada , tentu saja berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Kerangka teori meliputi : Tinjauan Tentang Surat Wasiat , Tinjauan Tentang Hukum Waris dan Tinjauan Tentang Pembagian Harta Warisan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penjelasan dari penelitian yang berupa Surat wasiat dalam Islam, Pembagian harta warisan dalam Islam dan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yang penulis temukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Surat Wasiat

a. Pengertian Surat Wasiat

Sebelum kita membahas tentang pengertian surat wasiat , ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa pengertian wasiat. Jika diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab , kata wasiat berasal dari kata “washshaitu asy-syaia , uushii , artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu) (Sayid Sabiq, 1988: 215).

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum adalah:

“Wasiat adalah memberi hak secara sukarela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati , baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan” (Hasbalah Thaib, 1992: 36).

Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikannya sebagai berikut : “wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang , piutang , ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat itu mati.

Sedangkan pengertian daripada surat wasiat adalah : “Surat wasiat atau dengan kata lain disebut dengan testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal , dan yang olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian , maka suatu testament adalah suatu akta , suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi yang berwenang , dan yang oleh si pembuatnya dapat ditarik kembali (Pasal 875 , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sebagaimana halnya hibah , bahwa dalam hal wasiat ini juga merupakan perbuatan sepihak , dengan kata lain tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima. Dari pengertian yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas apa yang menjadi pembeda pokok antara perbuatan hibah dengan wasiat ini , yaitu selain dilaksanakan dengan cara sukarela (demikian halnya dengan hibah) pelaksanaan atau peralihan haknya dilakukan setelah si pemberi meninggal dunia.

b. Dasar Hukum Wasiat / Surat Wasiat

Adapun yang menjadi dasar hukum dari wasiat atau surat wasiat adalah : Al-Kitab, As-Sunnah , Al-Ijma' dan logika (akal).

1) Al-Kitab / Al-Qur'an antara lain :

Dalam Surat Al-Baqoroh ayat 180 , yang artinya sebagai berikut:

“Diwajibkan atasmu , apabila salah seorang dari kamu akan mati , jika ia meninggalkan harta (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) bagi orang yang bertaqwa (kepada Tuhan)”. (H.B.Jassin, 1991: 35).

Sedang dalam surat Al-Maidah ayat 106 , Allah berfirman :

Yang artinya “Hai orang-orang yang beriman , apabila salah seorang kamu menghadapi kematian , sedangkan dia akan berwasiat , maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu , atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu , jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian “ (H.B.Jassin, 1991: 16)

2) Sunnah nabi

Pengertian Sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh, tradisi, dan terpuji. Ulama hadits memberikan pengertian sunnah sebagai berikut:

Artinya : *“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW”. Baik berupa perkataan, perbuatan, taqrirnya atau selain itu.”*

Jadi menurut pengertian ini, sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik yang berupa fisik, umpamanya; mengenai tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak Nabi dalam keadaan sehari-hari, baik sebelum atau sesudah bi'tsah (diangkat) menjadi Rasul.

Dalam As-Sunnah , kita temukan sebuah riwayat oleh Saad bin Abi Waqqas yang artinya sebagai berikut :

Rasulullah SAW , datang mengunjungi saya pada tahun Haji Wada' di waktu saya menderita sakit keras , lalu saya bertanya : “Ya Rasulullah , saya sedang menderita sakit keras , Bagaimana pendapat anda , saya ini orang berada , dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan dua pertiga harta saya itu?”

“Jangan ,” Jawab Rasulullah.

“Separoh , ya Rasulullah ,” sambungku.

“Jangan ,” Jawab Rasulullah.

“Sepertiga ,” sambungku lagi.

Rasulullah menjawab : “Sepertiga. Sebab , sepertiga itupun sudah banyak dan besar , karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”. (Sayid Sabiq, 1988: 214).

Sedang dalam Sunah Rasulullah SAW yang lain dapat ditemukan dalam hadis , antara lain yang artinya sebagai berikut :

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a., berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan , sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya”.

Ibnu Umar berkata : Tidak berlaku bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah SAW , mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku (Sayid Sabiq, 1988: 216-217).

- 3) Dasar hukum yang ketiga adalah Al-Ijma' , karena umat Islam sejak dari Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat dan ternyata hal itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Hal ini menunjukkan ada kesepakatan (ijma') umat Islam (Ahmad Rofiq, 1998: 445).
- 4) Berdasarkan akal sehat (logika) , manusia itu selalu bercita-cita supaya akhir hayatnya diakhiri dengan perbuatan-perbuatan (amaliyah) kebajikan untuk menambah amal yang telah ada dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati nurani manusia selalu membisikkan demikian , dan hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk menambah amal-amalmu, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemampuanmu atau menurut kesukaanmu” (Riwayat Bukhari dikutip oleh Sayid Sabiq, 1988: 218).

c. Hukum Wasiat

Dari ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang dikemukakan di atas , para ahli hukum Islam telah berbeda pendapat tentang hukum wasiat ini bagi seseorang yang akan meninggal dunia (Sayid Sabiq, 1990: 220-223):

- 1) Ahli hukum Islam Az-Zuhri dan Abu Mijlaz berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim yang hendak meninggal dunia dan ia meninggalkan harta , baik harta tersebut jumlahnya banyak ataupun jumlahnya sedikit.
- 2) Mazhab Masruq , Iyas , Qatadah , Ibnu Jarir dan Az-Zuhri memandang bahwa yang wajib wasiat tersebut hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mempusakai darinya (dalam istilah Hukum Waris Islam , kerabat yang seperti ini diistilahkan dengan dzawil arham , yaitu orang-orang yang masih mempunyai hubungan kasih sayang dengan si pewaris , akan tetapi dia bukan merupakan ahli waris , misalnya cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan , anak peliharaan , anak angkat dan lain-lain).
- 3) Ibnu Hazm berpendapat , bahwa berwasiat itu hukumnya fardlu 'ain berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 11 yang telah disebutkan di atas. Dalam ayat itu ditegaskan , bahwa harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang orang yang meninggal itu.
- 4) Jumhur Fukaha dan fukaha Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardlu'ain dan wajib , sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Abu Daud beserta ulama salaf lainnya dengan alasan :
 - a) Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan hal itu dan beliau pun tidak ada berwasiat mengenai harta peninggalan beliau
 - b) Kebanyakan dari sahabat Nabi tidak menjalankan wasiat dan ternyata tidak ada yang mengingkarinya (ijma' sukuti)
 - c) Wasiat itu adalah merupakan pemberian yang tidak wajib diserahterimakan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah dia meninggal dunia , tidak wajib melaksanakannya.

d) Bahwa kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lainnya tergantung kondisinya , yaitu : bisa saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan itu akan dia-siakan , misalnya dia masih mempunyai utang zakat. Dapat pula sunnat apabila wasiat itu diperuntukkan bagi kebajikan , seperti wasiat kepada karib kerabat , pembangunan masjid , pembangunan madrasah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan perintah agama. Selain itu dapat juga hukumnya haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut dapat merugikan ahli waris , bahkan batal demi hukum. Dan juga dapat makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit , sedangkan ahli waris yang ditinggalkan jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan terhadap harta tersebut (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, 1994: 124).

d. Jenis Wasiat

Menurut isinya , wasiat ada dua macam (Ali Afandi, 1986 :16):

1) Wasiat yang berisi “erfstelling” atau wasiat pengangkatan waris

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan , memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang , seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya jika ia meninggal dunia.

2) Wasiat yang berisi hibah atau legaat

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament , dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang:

- a) Beberapa barang tertentu
- b) Barang-barang dari suatu jenis tertentu
- c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya.

Jika dilihat dari penerima, lafaz dan harta yang diwasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi dalam empat jenis yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, wasiat khas.

1) Wasiat Mutlak

ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan yang mungkin diletakkan oleh si pemberi wasiat.

2) Wasiat Bersyarat

ialah wasiat yang mengandung syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat.

3) Wasiat Am

4) Wasiat Khas

e. Rukun dan Syarat Sahnya Wasiat

Adapun yang menjadi rukun dari wasiat atau surat wasiat itu adalah (Hasbalah Thaib, 1992: 41-54) :

1) Adanya pemberi wasiat

Pemberi wasiat haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) Berakal
- b) Baliq
- c) Merdeka
- d) Tidak mempunyai utang yang menghabiskan harta
- e) Pemberi wasiat dalam keadaan sukarela

2) Adanya pihak penerima wasiat

Dalam hal pihak penerima wasiat ini tentunya haruslah subyek hukum , yaitu apakah sifatnya personal (perorangan) maupun rechpersoon (badan hukum). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima wasiat ini adalah sebagai berikut :

- a) Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu pewasiatan terjadi.
- b) Penerima wasiat adalah orang atau badan hokum

- c) Penerima wasiat bukan pembunuh si pewasiat
- d) Penerima wasiat bukan sesuatu badan yang mengelola kemaksiatan
- e) Penerima wasiat bukan merupakan ahli waris dari si pewasiat

3) Adanya yang diwasiatkan

Adanya yang diwasiatkan maksudnya adalah obyek atau benda / barang yang diwasiatkan. Menyangkut benda yang diwasiatkan ini haruslah memenuhi beberapa syarat , yaitu :

- a) Benda itu kepunyaan si pemberi wasiat
- b) Benda tersebut bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai obyek bertransaksi
- c) Benda yang diwasiatkan telah ada pada waktu pewasiatan berlangsung
- d) Jumlah yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta kekayaan si pewasiat

4) Pelaksanaan Wasiat

Dalam prakteknya dewasa ini , untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari sering pernyataan pewasiatan itu dilakukan secara notarial , apakah dalam bentuk dibuat di hadapan Notaris atau disimpan dalam protokol Notaris.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku II Bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 195 KHI) :

- a) Pewasiat haruslah orang yang sudah berumur 21 tahun , berakal sehat dan didasarkan`kepada kesukarelaannya.
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
- c) Peralihan hak terhadap benda / barang yang diwasiatkan adalah setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah (Pasal 195 KHI) :

- a) Apabila pewasiatan itu dilakukan secara lisan maupun tertulis , hendaklah di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.
- b) Wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan , kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- c) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui semua ahli waris.
- d) Pernyataan persetujuan pada poin b dan c dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi atau dibuat di hadapan Notaris.

f. Wasiat Kepada Ahli Waris

Mengenai wasiat kepada ahli waris , terdapat perbedaan pendapat para ulama. Antara lain :

- 1) Ibnu Hazm dan fukaha Malikiyah berpendapat bahwa , wasiat tidak dibolehkan sama sekali kepada ahli waris yang menerima warisan , baik para ahli waris lainnya mengizinkan maupun tidak
- 2) Fukaha Syia'ah Imamiyah berpendapat , bahwa wasiat itu diperbolehkan walaupun tidak mendapat izin dari para ahli waris lainnya , sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 180 yang telah disebutkan di atas.
- 3) Fukaha Syafi'iyah dan ulama Malikiyah berpendapat , wasiat kepada ahli waris yang dapat menerima warisan dibenarkan dan sah atas izin ahli waris lainnya , sesuai dengan sabda Nabi yang artinya sebagai berikut :

“Tidak ada (boleh) bagi orang yang menerima warisan kecuali ahli waris lainnya memperbolehkannya” (Riwayat ad-Daru-Quthny).

Perizinan dari ahli waris ini merupakan suatu tanda , bahwa hak mereka rela dikurangi. Karena bisa saja orang yang berwasiat itu mempertimbangkan tentang kemungkinan orang yang menjadi tanggungannya itu kehidupannya akan suram di kemudian hari , seperti cacat fisik atau cacat mental. Kemungkinan lain adalah , di antara ahli warisnya itu ada yang masih kecil , sedang yang lainnya sudah bisa mandiri atau berumah tangga. Apabila dihadapkan kepada persoalan seperti ini , maka ahli waris lainnya harus dapat memahami keinginan dari yang berwasiat itu ,

dan hal ini sangat bergantung kepada kepribadian masing-masing orang.

- 4) Fukaha aliran Hanafiyah berpendapat bahwa , wasiat tidak dibenarkan kepada ahli waris yang mendapat warisan walaupun hanya sedikit , kecuali ada izin dari ahli waris lainnya. Alasannya hampir sama dengan Fukaha Syafi'iyah dan perbedaannya terletak pada , bahwa izin itu dinyatakan sesaat setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sedangkan menurut Syafi'iyah , izinnya boleh sebelum atau sesudah meninggal dunia.

g. Berwasiat Kepada Pembunuh

Apabila seorang berwasiat kepada seseorang , kemudian orang yang menerima wasiat itu membunuh orang yang memberi wasiat , maka ada beberapa pendapat dari para ulama dalam menetapkan sah atau tidaknya wasiat itu.

- 1) Fukaha Syafi'iyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat , bahwa wasiat itu sah walaupun pembunuhan dilakukan dengan sengaja ataupun motif lain seperti mempercepat kematian orang yang memberi wasiat itu , agar segera memperoleh harta yang diwasiatkan. Tindakan orang tersebut menyebabkan dia tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya itu , tetapi tidak menafikan untuk menerima harta yang diwasiatkan kepadanya.
- 2) Fukaha Hanafiyah mengesahkan wasiat kepada orang yang membunuhnya , asalkan pembunuhan itu dilakukan karena unsur ketidaksengajaan atau karena khilaf. Apabila terdapat unsur kesengajaan , maka wasiat itu batal dengan sendirinya. Jika pembunuhan itu karena khilaf , (seperti memukul dengan benda yang menurut kebiasaannya tidak sampai mematikan dan tidak ada niat untuk membunuhnya) , maka wasiat itupun batal juga , kecuali ada izin dari pihak ahli waris. Dalam hal ini sah atau tidaknya wasiat itu tergantung kepada ahli waris , karena hak mereka akan dikurangi. Jadi pembunuhan dengan sengaja itu tetap batal , walaupun mendapat izin dari pihak ahli waris.
- 3) Imam Abu Yusuf berpendapat, bahwa wasiat itu tidak sah walaupun ahli waris mengizinkannya , apalagi tidak mengizinkannya.

h. Batas Jumlah Harta Yang Diwasiatkan

Orang yang menerima wasiat itu adakalanya dari kalangan ahli waris dan adakalanya bukan dari kalangan ahli waris. Apabila orang yang menerima wasiat bukan dari ahli waris , maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu izin dari ahli waris , asalkan yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan itu. Jika melebihi dari sepertiga , perlu mendapat persetujuan dari ahli waris. Sekiranya tidak disetujui , maka yang batal adalah hanya yang lebih dari sepertiga itu saja , dan yang sepertiga tetap berlaku dan dilaksanakan. Apabila wasiat itu diberikan kepada ahli waris , maka wasiat itu belum bisa dilaksanakan sebelum ada persetujuan dari ahli waris lainnya , walaupun jumlahnya kurang dari sepertiga (M.Ali Hasan, 2002: 99).

i. Pembatalan dan Batalnya Surat Wasiat

Karena wasiat ini didasarkan kepada kesukarelaan pemberi wasiat , maka dengan sendirinya dapat dilakukan pembatalan oleh si pewasiat lagi pula dengan pernyataan wasiat belum berarti berpindahnya hak kepada penerima wasiat , karena peralihan hak baru dapat terjadi apabila si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Menyangkut hal ini , Sayid Sabiq mengungkapkan sebagai berikut : “Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan , yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya , atau menarik kembali apa yang ia kehendaki dari wasiatnya , atau menarik kembali apa yang diwasiatkannya” (Sayid Sabiq, 1988: 224).

Adapun prosedur pembatalan wasiat ini dapat dilakukan dengan pernyataan penarikan kembali wasiatnya , baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis , atau dapat juga penarikan itu dilakukan dengan perbuatan , misalnya si A mewasiatkan tanahnya diberikan kepada si B , kemudian si A menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain (Sayid Sabiq, 1988: 224).

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang batalnya wasiat diatur dalam Pasal 197 , yaitu sebagai berikut :

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat.

- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut , tetapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c) Mengetahui adanya wasiat tersebut , tetapi ia tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

j. Pencabutan Wasiat dan Tata Caranya

Pencabutan suatu wasiat adalah suatu hal yang inhaerent dengan sifatnya wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir dari si pewaris. Apa yang pernah dinyatakan dalam wasiat pada suatu waktu harus dapat dicabut atau dirubah kemudian , dan wasiat yang terakhir ini berlaku sebagai kehendak yang paling akhir. Selanjutnya pencabutan wasiat itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 199 , adapun tata cara pencabutan wasiat adalah sebagai berikut :

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis , maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat dengan akta notaris , maka hanya dapat dicabut dengan akta Notaris.

2. Tinjauan tentang Hukum Waris

a. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (tirkah) pewaris , menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Dalam terminologi fiqh biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini karena kata-kata warasa (asal kata waris) , digunakan dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'anlah dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah , hukum kewarisan Islam dibangun. Secara bahasa , kata warasa memiliki beberapa arti , yaitu : pertama , mengganti (QS Al-Naml , 27:16) , artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud , serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua , memberi (QS Al-Zumar , 39:74) , dan yang ketiga , mewarisi (QS Maryam , 19:6). Sedangkan menurut pengertian terminologi , hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan , mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak (Muh.Syarbini al-Khatib , Mugni al-Muhtaj juz 3, 1958: 3).

Dalam redaksi yang lain dikemukakan , hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi , bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya (T.M.Hasby ash-Shiddieqy , Fiqh Mawaris : 8).

Berbeda dengan dua definisi di atas Wirjono Prodjodikoro menjelaskan , warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Wirjono Prodjodikoro, 1983: 13).

Hukum Waris sering dikenal dengan istilah *faraid* , bentuk jamak dari kata tunggal

faridah , artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam , bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an. Meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat secara persis nominalnya , seperti masalah *radd* atau '*aul*' (Ahmad Rofiq, 1998: 356). Hukum waris mendapat perhatian besar , karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS Ali Imran, 3:14) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta benda tersebut , termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat warisan di pengadilan , baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini.

Bahkan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat qat'i al-dalalah adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia tadi , disamping sebagai rekayasa sosial (social engineering) terhadap system hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam waktu itu. QS An-Nisaa' misalnya , diturunkan untuk menjawab tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan peperangan (Ahmad Rofiq, 1998: 357).

b. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam , sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut :

1) Ayat-ayat Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan antara lain (Amir Syarifudin, 2004: 7):

a) QS.An-Nisa (4): ayat 11, yang artinya :

Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau

perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfaatnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Ahmad Rofiq, 1998: 375).

b) QS.An-Nisa (4):12 , yang artinya :

“Bagi masing-masing Kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat , dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka , maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu” (Ahmad Rofiq, 1998: 376).

c) QS.An-Nisa (4):176 , yang artinya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah :Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia , dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan , maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya , dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) , jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang , maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan , maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Ahmad Rofiq, 1998: 376).

2) Sunnah Nabi

Selain sumber hukum dari Al-Qur'an ada beberapa hadist Nabi yang berkaitan dengan warisan , antara lain (Afdol, 2003: 15-16):

a) Dalam kitab Bulughul Maram , terjemahan Muhammad Machfudin Aladip , terdapat hadist Ibnu Abbas r.a. ia berkata : “*Bersabda Rasulullah SAW , serahkan pembagian warisan itu kepada ahlinya , bila ada yang tersisa maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat*” (Hadist Imam Bukhari dan Imam Muslim).

- b) Hadist dari Usama putra Zaid , ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :
“Orang Islam tidak punya hak atas orang kafir , dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam” (Hadist Imam Bukhari dan Imam Muslim).
- c) Hadist dari Jabir r.a berkata : *“Bayi yang sudah dapat menangis itupun termasuk ahli waris”* (Hadist riwayat Abu Dawud).
- d) Hadist dari Amr putra Syu’aib dari ayahnya , dari kakeknya r.a ia berkata :
“Bersabda Rasulullah SAW , bagi pembunuh tidak punya hak waris sedikitpun”
 (Hadist riwayat Imam Nasa’i dan Imam Darul Quthny).
- e) Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim , dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash , dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada ashabah laki-laki terdekat kepada si pewaris”* (Sayid Sabiq, 1988: 259).
- f) Hadist riwayat Ath Thabarani , Al Baihaqi dan Said bin Manshur , sanadnya dihasankan oleh Al Hafdz Ibnu Hajar , bahwa Rasulullah SAW bersabda :
“Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian , seandainya aku hendak melebihkan seseorang , tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan.”

3) Ijtihad

Pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan , yang belum atau tidak disepakati.

c. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazimnya disebut *Faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW , Hukum Kewarisan Islam mengandung beerbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu

mempunyai corak tersendiri , berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu.

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris , cara pemilikan harta oleh yang menerima , kadar jumlah harta yang diterima pada waktu dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Amir Syarifudin, 2004: 17):

1) Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima .

2) Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat , yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual , dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri , tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

4) Asas Keadilan Berimbang

Artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban , dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dengan kata lain segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati , tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam.

d. Rukun-Rukun Hukum Kewarisan

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur , yaitu :pewaris , harta warisan dan ahli waris (Ali Afandi, 1986: 21).

- 1) Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewarisan ini adalah “telah jelas matinya”. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan yang berakibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidupnya atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seseorang itu masih hidup selam belum ada kepastian kematiannya, dikalangan ahli Ushul Fiqih disebut” mengamalkan prinsip *istishab al sifah*” (Abu Zahrah, 1957: 285).

- 2) Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dan terlepas dari segala macam hak orang lain didalamnya (Ibnu Abidin, 1966: 759).
- 3) Ahli waris atau warits adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggal oleh orang yang meninggal.

e. Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan sebagai

berikut (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 10):

- 1) Hukum Waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki , seperti yang berlaku dalam system kapitalis / individualisme , dan melarang sama sekali bagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip Komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan , yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
- 2) Warisan adalah hukum , yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan , dan ahli waris berhak atas harta warisan memerlukan adanya pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian ahli waris dibebani melunasi utang-utang pewaris.
- 3) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga , dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah.
- 4) Hukum Waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris , dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- 5) Hukum Waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan anak-anak yang sudah besar , yang masih kecil yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaan besar kecil bagian diadakan , sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga.
- 6) Hukum Waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari , disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris.

f. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris , terlebih dahulu diperhatikan hak-hak yang menyangkut peninggalan itu , sebab pewaris pada masa hidupnya mempunyai utang yang belum terbayar , meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta

peninggalan dan sebagainya.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 12) :

- 1) Hak-hak yang menyangkut kepentingan pewaris sendiri , yaitu biaya-biaya penyelenggaraan jenazahnya , sejak dimandikan sampai dimakamkan.
- 2) Hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur
- 3) Hak-hak yang menyangkut kepentingan orang-orang yang menerima wasiat
- 4) Hak-hak ahli waris

g. Sebab Terjadi Warisan

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir (1999: 14) yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam sebagai berikut :

- 1) Hubungan *kerabat* atau *nasab*, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
- 2) Hubungan *perkawinan*, yaitu suami atau isteri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa ‘iddah talak raj’i.
- 3) Hubungan *walak*, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (Praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang).
- 4) *Tujuan Islam* (jihatul islam). Yaitu baitul mal (perbendaharaan Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.

h. Syarat-syarat Warisan

Syarat-syarat warisan ada tiga macam (Ahmad Azhar Basyir, 1999:16):

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang

(mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalya.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanbaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati.

Menurut pendapat ulama-ulama madzhab lain, terserah kepada itjtihad hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

- 2) Waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal. Dengan demikian apabila dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya orang-orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbanagn, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris ; syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan. Terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.

c. Penghalang-penghalang warisan

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak salah satu dari tiga macam penghalang sebagai berikut (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 16):

- 1) *Berbeda agama* antara pewaris dan waris; alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.

Antara suami isteri yang berlainan agama, misalnya suami beragama Islam dan isteri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan suami atau isteri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

- 2) *Membunuh*. Hadist Nabi mengajarkan bahwa : pembunuhan tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksudkan dengan membunuh adalah pembunuhan dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya, percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.
- 3) *Menjadi budak orang lain*, budak tidak berhak memiliki sesuatu, oleh karena itu tidak berhak waris (Praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian, karena perbudakan sudah lama hilang).

3. Tinjauan tentang Pembagian Harta Warisan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa harta warisan ialah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan , maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa harta warisan ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang saat matinya, merekapun berpendapat ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta warisan itu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Di dalam Al-Qur'an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli warisnya yaitu wasiat dan utang. Sekalipun dalam Al-Qur'an , Allah menyebutkan wasiat lebih dahulu daripada utang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran hutang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini adalah wasiat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan (M.Ali Sayis, 1953: 47).

a. Urut Tindakan Mendahului Pembagian Harta Warisan (Amir Syarifudin, 2004: 280):

1) Biaya Pengurusan Jenazah

Walaupun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali tentang ongkos pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari jumhur ulama menetapkan bahwa biaya

pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan (Ibnu Abidin , 1966: 780).

2) Pembayaran Utang Pewaris

Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris, karena utang itu dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang tinggal hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu.

Utang orang yang meninggal secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok , yaitu (Amir Syarifudin, 2004: 281) :

- a) Utang kepada Allah , yaitu kewajiban-kewajiban agama dalam bentuk materi yang telah wajib dilaksanakan selagi hidup tetapi belum dilakukan sebelum ia meninggal, seperti zakat , kaffarah dan nazar yang belum dilaksanakan.
- b) Utang kepada sesama manusia , yaitu utang yang dibuat oleh yang meninggal sebelum ia meninggal atau hak orang lain yang ada di tangannya , barang orang lain yang belum diserahkan sebelum meninggalnya. Misalnya : utang yang menyangkut dengan benda milik seseorang yang ada padanya sebelum ia meninggal , utang dalam bentuk tanggung jawab yang belum dibayarnya dan utang dalam bentuk tanggung jawab yang dibuatnya waktu sakit yang dekat kematiannya (M.Ali Ash Shabuniy, 1961: 380).

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah membayarkan atau menyerahkan surat wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.

b. Pelaksanaan Pembagian Warisan

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita , namun

ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut. Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.

Setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, baik secara fisik maupun secara perhitungan maka usaha selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk angka dan uang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 2) Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada di tempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut :
 - a) Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan.
 - b) Kepastian syarat yang ditentukan seperti : apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak.
 - c) Kepastian tidak adanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris, dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris.
 - d) Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia *dihijab* secara *hijab hirman* oleh ahli waris yang ada bersamanya.
- 3) Memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau *dzaul furudh* atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias *ashabah* atau hanya sekedar *dzaul arham*.

Selanjutnya berlakulah langkah pembagian sebagai berikut :

- a) Ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya ialah ahli waris *dzaul furudh*, karena orang yang berhak dan bagiannya telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an atau hadist Nabi. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi dalam hadist yang

diriwayatkan oleh al-Bukhary dan Muslim dari Ibnu Abbas yang memerintahkan untuk memberikan harta kepada *dzaul furudh* yang disebutkan dalam Al-Qur'an terlebih dahulu dan kelebihannya diberikan untuk kerabat laki-laki melalui laki-laki. Atas dasar hadist Nabi tersebut maka keharusan yang pertama adalah membagikan harta warisan untuk orang yang sudah pasti haknya itu.

- b) Bila harta tidak terbagi habis di antara ahli waris *dzaul furudh* sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ada yang berhak atas sisa harta itu, maka kelebihan harta itu diberikan kepada ahli waris yang berhak atas sisa harta itu secara pembagian yang bersifat terbuka. Oleh golongan Ahlul Sunnah ahli waris sisa harta itu disebut ahli waris *ashabah* dan di kalangan ulama Syi'ah ahli waris sisa harta itu dinamakan *ahli waris kerabat*.
- c) Bila harta tidak habis terbagi sedangkan ahli waris *ashabah* dan *ahli waris kerabat* tidak ada pula, maka dalam penyelesaian kelebihan harta ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan mereka dalam hak kewarisan *dzaul arham*.

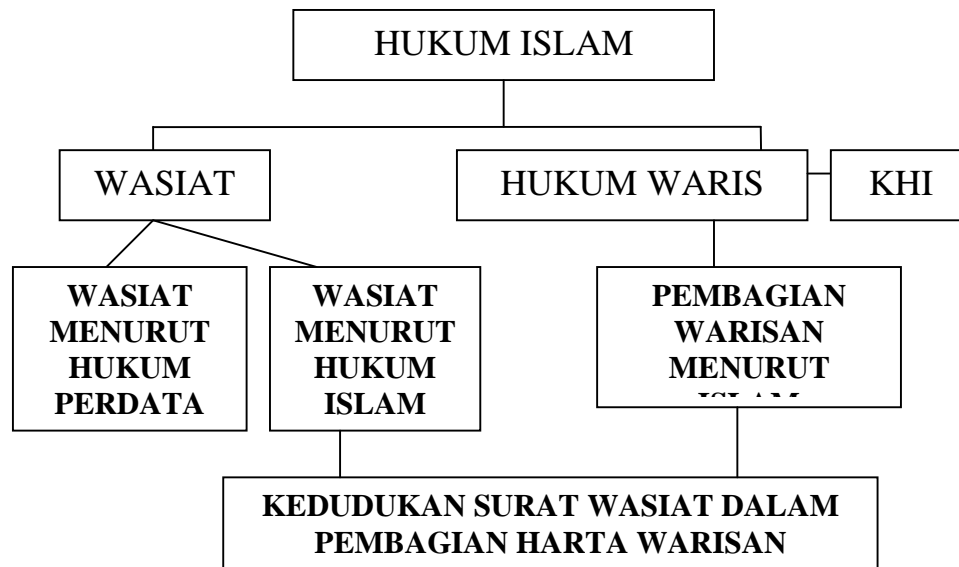
Menurut golongan ulama yang tidak menerima adanya kewarisan *dzaul arham*, maka sisa harta itu diserahkan ke baitul mal. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Syafi'I, kelompok mutakhir dari kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa baitul mal tidak terurus, maka kelebihan harta itu diselesaikan secara *radd*. Bila tidak mungkin diselesaikan secara *radd*, maka kelebihan harta itu baru diserahkan ke ahli waris *dzaul arham*.

Bila pewaris tidak meninggalkan harta sama sekali, maka ia punah dalam arti sebenarnya, dalam artian maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *baitul mal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

B. Kerangka Pemikiran

Sebagai gambaran dalam penulisan hukum ini maka diperlukan adanya sebuah

kerangka pemikiran yang terperinci agar pemecahan masalah dalam penulisan hukum ini lebih terarah. Adapun kerangka pemikiran tersebut penulis gambarkan sebagai berikut :



Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam. Hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut hukum *muamalat*. Yang menjadi bagian dari hukum ini antara lain hukum waris dan hukum yang mengatur tentang wasiat. Dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari wasiat dan hukum waris mempunyai hubungan yang erat, Dalam pembagian warisan jika pewaris meninggalkan sebuah wasiat atau surat wasiat, maka dalam kedudukannya wasiat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum warisan itu dibagi.

Menurut kajian di atas, maka dianggap perlu untuk melakukan kajian terhadap hukum waris dan wasiat dalam Islam tersebut mengenai kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan dalam kaitannya dengan harta warisan. Apakah hal-hal tersebut sesuai dengan Syariat Islam ataukah sesuai dengan hukum yang lain.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Surat Wasiat Dalam Islam

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai apa wasiat itu, terutama wasiat dalam Islam. Pengertian wasiat secara umum adalah pesan terakhir yang diucapkan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal dunia yang berkenaan dengan harta benda dan sebagainya (Poerwadarminta, 1984: 1149). Secara bahasa, wasiat artinya berpesan. Kata wasiat disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut sebanyak 2 kali. Seluruhnya dalam Al-Qur'an, wasiat disebut sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti : berpesan, menetapkan, memerintah (QS.Al-An'am, 6:151,152,153, An-Nisa',4:131), mewajibkan (QS.Al-Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, Asy-Syura, 42:13, Al-Ahqaf, 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisa', 4:11). Sementara pendapat mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan (Ahmad Rofiq, 2000: 438).

Dalam pengertian istilah, Sayid Sabiq mengemukakan :

Pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia (Sayid Sabiq, 1987: 414).

Pendapat yang lain mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak si pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Ini sejalan dengan definisi Fuqaha' Hanafiyah yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Rahim :

Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat (Ahmad Rofiq, 2000: 439).

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai berikut : “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f KHI). Di dalam terminology hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament*, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi tabarru’, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum (Ahmad Rofiq, 2000: 439).

Sedangkan pengertian daripada surat wasiat adalah : “Surat wasiat atau dengan kata lain disebut dengan *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal , dan yang olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian , maka suatu *testament* adalah suatu akta , suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi yang berwenang , dan yang oleh si pembuatnya dapat ditarik kembali (Pasal 875 , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Analisis Penulis

Terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli dalam mendefinisikan pengertian wasiat dan surat wasiat. Tetapi disini penulis akan mencoba mengungkapkan apa itu wasiat dan surat wasiat menurut hukum Islam.

Menurut penulis, wasiat adalah suatu tindakan dari seseorang untuk menyerahkan atau mengalihkan sesuatu baik berupa benda, hak atau manfaat secara sukarela kepada orang lain yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian si pewasiat. Sedangkan yang dimaksud dengan surat wasiat atau yang dalam hukum perdata disebut dengan *testament* , adalah suatu akta yang dibuat oleh seseorang , baik lisan maupun tertulis sebelum orang tersebut meninggal dunia yang berisi tentang pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia yang olehnya dapat ditarik kembali, yang dibuat di hadapan dua orang saksi atau dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris.

Wasiat timbul sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, manusia selalu berusaha untuk

berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup. Salah satu amal kebaikan tersebut adalah membuat surat wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain. Seseorang dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas (sudah nyata bendanya) maupun terhadap harta yang masih samar, atau terhadap harta yang masih akan ada. Harta yang sudah nyata dapat berupa sebuah rumah, sebidang tanah yang tertentu batas-batasnya dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang masih samar seperti ikan yang berada di dalam kolam, atau laba perusahaan yang belum dibagi. Pengertian samar disini adalah jumlah obyek wasiat yang belum mempunyai kebulatan dalam hitungan. Sedangkan harta yang masih akan ada adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang masih belum menghasilkan atau berbuah.

Jadi wasiat itu adalah tindakan dari seseorang untuk mengalihkan harta atau haknya secara sukarela setelah ia meninggal dunia, sedangkan surat wasiat adalah suatu akta yang dibuat si pewasiat yang digunakan sebagai suatu bukti bahwa dia telah memberikan, mengalihkan atau menyerahkan harta atau haknya setelah ia meninggal dunia agar wasiat itu mempunyai kekuatan hukum dan dapat diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan ahli waris maupun dari pihak orang yang menerima wasiat atau surat wasiat. Hal itu dimaksudkan agar harta dari si pewasiat atau pewaris itu nantinya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk menghindari adanya perpecahan, kerusakan atau pertumpahan darah di kalangan ahli waris dan pihak yang menerima wasiat dan dapat terciptanya keadilan bagi para pihak.

B. Pembagian Harta Warisan Dalam Islam

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa, masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau system kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an ketika itu dan untuk seterusnya. *Pertama*, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. *Kedua*, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami istri saling mewarisi. *Keempat*, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu (Abdul Ghofur Anshori, 2002: 14).

Urgensi kewarisan yang lain ialah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta yang benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antar ahli waris. Pentingnya masalah hukum kewarisan ini dapat dibuktikan melalui pesan Nabi kepada umatnya untuk mempelajarinya. Seperti sabda beliau yang diriwayatkan Ahmad Ibnu Hambal :

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajarilah pula faraidl dan ajarkanlan kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraidl dan masalahnya, maka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya” (Abdul Ghofur Anshori, 2002: 15).

Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim. Fungsi-fungsi tersebut antara lain (Abdul Ghofur Anshori, 2002: 15) :

1. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Apalagi kalau diingat bahwa system kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi orang tua, suami atau istri, saudara bahkan cucu, kakek atau nenek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris memberi/menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir khususnya di antara kerabat (QS.An-Nisa’(4) : 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu-bapak dan diluar kerabat juga kepada istri untuk menjaga kesejahteraan (QS.Al-Baqarah (2):180 dan 240). Di samping itu masih ada hal lain, pewaris yang tidak mempunyai keturunan sama sekali maka harta peninggalan itu disalurkan melalui baitul mal (HR.Ahmad dan Abu Daud).
2. Sebagai prevensi dan kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS.An-Nisa’(4) : 37).
3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna mencari rizki yang halal dan berkecukupan. Dengan adanya semangat kerja atau etos kerja, manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Sehingga ketika mereka meninggal akan memiliki kebanggaan karena mampu memberikan harta warisan kepada

yang ditinggalkannya.

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membatasi bagian seseorang dari hak warisnya. Al-Qur'anul Karim dijadikan sandaran dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (dalam hal waris) yang ditetapkan dengan Sunnah dan Ijma'. Warisan merupakan essensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.

Di dalam membicarakan hukum warisan maka ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (Afdol, 2003: 96) :

1. harta kekayaan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan yang akan beralih kepada ahli waris
2. Pewaris atau orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta warisan / harta kekayaan.
3. ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu

1. Harta Warisan

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya (Amir Syarifudin, 2004: 206). Jadi di dalam hukum Islam tidak ada perbedaan atau tidak dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan.

Suatu ikatan perkawinan berdasarkan hukum Islam, menimbulkan adanya harta perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta perkawinan ini menjadi harta bersama milik suami istri, sekalipun hanya sang suami yang bekerja. Di dalam pasal 1f KHI ditentukan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dengan demikian apabila ada yang ingin mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, menurut pasal 47 ayat 2 KHI, perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian ada tiga macam harta dalam perkawinan, yaitu a.Harta Pribadi Suami atau Harta Bawaan Suami; b.Harta Pribadi Istri atau Harta Bawaan Istri; c.Harta Perkawinan atau Harta Bersama, milik suami dan istri. Pasal 86 ayat 1 KHI menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan. Hak atas harta bawaan ini ditegaskan dalam pasal 86 ayat 2 KHI, yang menentukan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai harta bawaan ini Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lanjut dalam pasal 87 ayat 1, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Guna melengkapi hal tersebut ayat selanjutnya menegaskan bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Selain hak atas harta bawaan, suami atau istri berhak atas separuh harta perkawinan atau harta bersama, apabila terjadi perceraian. Pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan, pasal 96 ayat 1 KHI menentukan pula bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Perhitungan besarnya harta warisan, sesuai dengan isi pasal 171e dan pasal 96 KHI berarti sama dengan harta bawaan ditambah separuh harta bersama. Guna memperoleh kepastian besarnya harta warisan dalam keadaan bersih, perlu dikurangi dengan beban-beban yang terdapat di dalam harta tersebut, antara lain:

1. biaya untuk keperluan pewaris selama sakit
2. biaya pengurusan jenazah
3. pembayaran hutang
4. pemberian untuk kerabat

Biaya untuk keperluan pewaris selama sakit nilainya sangat bervariasi. Ada pewaris yang sebelum meninggal dunia menderita sakit yang cukup berat, sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Boleh jadi biaya untuk keperluan itu sangat besar dan dapat diperhitungkan dalam menentukan besarnya harta warisan. Demikian juga dengan biaya pengurusan jenazah, akan berbeda antara kasus yang satu dengan yang lainnya.

Secara yuridis hutang pewaris wajib dibayar sebatas harta peninggalan pewaris saja. Sisa hutang pewaris selebihnya hanya menjadi kewajiban moral para ahli waris untuk melunasinya. Pasal 175 ayat 2 KHI menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pemberian untuk kerabat baik yang berbentuk hibah atau wasiat dibatasi maksimum sepertiga. Pasal 195 ayat 2 KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Membagi harta warisan akan lebih mudah dilakukan apabila harta tersebut sudah dalam bentuk uang, sehingga mudah membagikan kepada ahli waris menurut bagian mereka masing-masing. Namun hampir selalu terjadi dalam pembagian harta warisan, harta warisan yang akan dibagi dalam bentuk: rumah, tanah, kendaraan dan sebagainya, bahkan juga berupa suatu atau beberapa perusahaan.

2. Pewaris

Pewaris, yang dalam literature fikih disebut *al-muwarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup (Amir Syarifudin, 2004: 204). Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris

kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengetahuan seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Menurut Abu Zahrah syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah “telah jelas matinya”. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seseorang itu masih hidup selama belum ada kepastian tentang kematiannya, di kalangan ahli Ushul Fikih disebut “mengamalkan prinsip *istishhab al-sifah*” (Amir Syarifudin, 2004: 206).

Walapun secara umum menurut Al-Syawkani terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam pengamalan prinsip al-istishab, namun terhadap *istishhab al-sifah* untuk mempertahankan hak milik yang ada padanya, terlihat adanya kesamaan pendapat. Oleh karena itu, harta yang ditinggal pergi seseorang tetap menjadi miliknya secara penuh sampai diyakini kematiannya. Dengan demikian si peninggal harta itu belum dapat disebut sebagai pewaris dan harta yang ditinggalkannya belum dapat disebut harta warisan (Amir Syarifudin, 2004: 206).

3. Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (Amir Syarifudin, 2004: 211). Dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum

Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan dalam pasal 171c KHI, yaitu :

1. orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
2. beragama Islam
3. tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Persyaratan pertama menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda atau duda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai hal ini dirumuskan dalam pasal 174 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Persyaratan kedua adalah ahli waris beragama Islam. Jadi apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka ia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di dalam hukum waris Islam.

Dalam rangka menerapkan hukum waris Islam yang berkeadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi No.51.K/AG/1999.tanggal 29 September 1999, yang pada prinsipnya memutuskan bahwa anak kandung yang telah pindah agama mendapat wasiat wajibah. Putusan ini tidak berarti bertentangan dengan syariat Islam, karena anak tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Sebagai seseorang yang dekat dengan pewaris adalah adil apabila dia mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya melalui wasiat wajibah (Afdol, 2003: 98).

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 24). Sedangkan dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: dzawil furudl, ‘ashabah dan dzawil arhaam {Kompilasi Hukum Islam}.

a. Dari segi jenis kelaminnya

- 1) Ahli waris laki-laki, terdiri dari (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 24) :
 - a) Ayah.
 - b) Kakek (bapak dari ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
 - c) Anak laki-laki.
 - d) Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.

- e) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah).
- f) Saudara laki-laki seayah.
- g) Saudara laki-laki seibu.
- h) Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- i) Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- j) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- k) Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- l) Saudara laki-laki sepupu kandung (anak laki-laki dari paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya, dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki.
- m) Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk seperti yang disebutkan pada huruf l.
- n) Suami.
- o) Laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).

2) Ahli waris perempuan, terdiri dari (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 25) :

- a) Ibu
- b) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan.
- c) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan.
- d) Anak perempuan.
- e) Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- f) Saudara perempuan kandung
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu

- i) Isteri
- j) Perempuan yang memerdekakan budak (mu'tiqah)

b. Dari segi haknya atas dasar harta warisan (KHI)

1) Ahli waris dzawil furudl

Ahli waris dzawil furudl disebutkan dalam pasal 192 KHI. Kata dzawil furudl berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat (Afdol, 2003: 99).

Ahli waris dzawil furudl ialah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an atau Sunnah Rasul. Sebagaimana telah disebutkan, bagian-bagian tertentu itu ialah : $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 25).

Ahli dzawil furudl itu antara lain adalah (Amir Syarifudin, 2004: 225):

a) Anak perempuan. Kemungkinan bagian anak perempuan adalah sebagai berikut:

- (1) $\frac{1}{2}$ bila ia sendirian (tidak bersama anak laki-laki)
- (2) $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki

Dasar bagian anak tersebut adalah QS.An-Nisa' (4): 11.

b) Cucu perempuan. Kemungkinan bagian cucu perempuan adalah :

- (1) $\frac{1}{2}$ bila ia sendirian saja
- (2) $\frac{2}{3}$ bila ia ada dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki, kemudian di antara mereka berbagi sama banyak.

Dasar hak kewarisan cucu perempuan di atas adalah analog atau *qiyas* kepada anak perempuan.

- (3) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak perempuan seorang saja. Dasarnya adalah hadist Nabi.

Dasar hak kewarisan cucu perempuan di atas adalah analog atau *qiyas* kepada anak perempuan.

c) Ibu. Bagian ibu ada tiga kemungkinan ,yaitu:

- (1) $\frac{1}{6}$ bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih

(2) $\frac{1}{3}$ bila ia tidak bersama anak atau cucu, tetapi hanya bersama ayah

(3) $\frac{1}{3}$ dari sisa bila ibu tidak bersama anak atau cucu, tetapi bersama dengan suami atau istri.

Dasar dari hak kewarisan ibu dalam poin (1) dan (2) adalah QS.An-Nisa' (4): 11, sedangkan poin (3) adalah ijthid ulama sahabat.

d) Ayah. Kemungkinan bagian ayah adalah :

(1) $\frac{1}{6}$ bila ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki.

(2) $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan.

Dasar dari hak kewarisan ayah dalam poin (1) adalah QS.An-Nisa' (4): 11, sedangkan poin (2) dan (3) gabungan dari QS.An-Nisa'(4) ayat 11 dan hadist Nabi poin a).

e) Kakek. Sebagai ahli waris dzawil furudl kemungkinan bagian kakek sama dengan ayah, karena ia adalah pengganti ayah waktu ayah sudah tidak ada. Bagiannya adalah sebagai berikut:

(1) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki

(2) $\frac{1}{6}$ bagian dan mengambil sisa harta bila ia bersama anak atau cucu perempuan.

Dasar dari hak kakek dalam segala kemungkinan tersebut adalah analog dengan ayah di samping hadist Nabi poin d)..

f) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah)

Nenek mendapat $\frac{1}{6}$, baik ia sendirian atau lebih. Dasar dari hak nenek $\frac{1}{6}$ ini adalah hadist Nabi poin e) tersebut di atas. Bila nenek lebih dari seorang, di antara mereka berbagi sama banyak. Ini adalah pendapat jumhur Ahlu Sunnah. Menurut Ibnu Qudamah Kewarisan nenek adalah sebagai nenek dan bukan sebagai pengganti ibu yang bagiannya mengikuti apa yang berlaku pada ibu. Bagian nenek adalah $\frac{1}{6}$ dalam keadaan apapun (Amir Syarifudin, 2004: 227).

Menurut Ibnu Hazm, Ulama Zhahiri menempatkan nenek sebagai pengganti ibu dengan segala kemungkinan bagiannya. Oleh karena itu nenek mendapat $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak atau cucu (Amir Syarifudin, 2004: 227).

g) Saudara perempuan kandung. Mendapat bagian dalam bebera kemungkinan, yaitu :

- (1) $\frac{1}{2}$ bila ia hanya seorang tidak ada bersamanya saudara laki-laki
- (2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki kemudian di antara mereka berbagi sama banyak.

Dasar hak saudara perempuan kandung tersebut adalah QS.An-Nisa' ayat 176.

h) Saudara perempuan seayah. Kemungkinan bagiannya adalah:

- (1) $\frac{1}{2}$ bila ia hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki-laki seayah
- (2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki seayah
- (3) $\frac{1}{6}$ bila ia bersama seorang saudara kandung perempuan

Menurut golongan ulama Syi'ah dalam kasus seperti ini ia tertutup oleh saudara kandung perempuan sebagaimana juga ditutup saudara kandung laki-laki. Dasar hak saudara perempuan seayah pada poin (!) dan (2) tersebut adalah QS.An-Nisa' ayat 176 dan pada poin (3) adalah hasil ijtihad ulama.

i) Saudara laki-laki seibu. Kemungkinannya bagiannya adalah:

- (1) $\frac{1}{6}$ bila ia hanya seorang
- (2) $\frac{1}{3}$ bila ia lebih dari seorang dan di antara mereka berbagi sama banyak

Dasar hak kewarisan saudara laki-laki seibu adalah QS.An-Nisa'(4): 12

j) Saudara perempuan seibu. Kemungkinan bagiannya adalah:

- (1) $\frac{1}{6}$ bila ia hanya seorang
- (2) $\frac{1}{3}$ bila ia lebih dari seorang dan di antara mereka berbagi sama banyak

Dasar hak kewarisan saudara laki-laki seibu adalah QS.An-Nisa'(4): 12

k) Suami. Kemungkinan bagian suami adalah:

- (1) $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu
- (2) $\frac{1}{4}$ bila ada bersamanya anak atau cucu

Dasar hak kewarisan bagian suami adalah QS.An-Nisa'(4): 12.

l) Istri. Bagian istri adalah:

- (1) $\frac{1}{4}$ bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris
- (2) $\frac{1}{8}$ bila ia bersama dengan anak atau cucu dalam kewarisan

Dasar hak kewarisan bagian istri adalah QS.An-Nisa'(4): 12.

2) Ahli waris 'ashobah

Ahli waris 'ashobah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan

menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* sama sekali; jika ada *dzawil furudl*, berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapat bagian apapun (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 26).

Menurut Al-Mahaliy, Ulama golongan Ahlu Sunnah membagi *ashabah* itu kepada tiga macam yaitu *ashabah bi nafsihi*, *ashabah bi ghairihi* dan *ashabah ma'a ghairihi* (Amir Syarifudin, 2004: 232).

a) *Ashabah bi Nafsihi*

Ashabah bi nafsihi adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris lain. *Ashabah bi nafsihi* itu seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah : anak, cucu (dari garis laki-laki-ed), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah.

(1) Anak laki-laki

Anak laki-laki, baik sendirian atau lebih, berhak atas seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang lain atau sisa harta setelah diberikan lebih dahulu hak ahli waris *dzawil furudl* yang berhak. Dengan adanya anak laki-laki sebagai *ashabah*, maka ahli waris lain yang dapat mewaris bersama anak lain-laki (sebagai *dzawil furudl*) ayah, ibu atau nenek, suami atau istri. Bila anak laki-laki terdiri dari beberapa orang mereka berbagi sama banyak.

(2) Cucu laki-laki (melalui anak laki-laki)

Cucu laki-laki mewarisi sebagai ahli waris *ashabah* bila anak sudah meninggal, baik anak itu adalah ayahnya atau saudara dari ayahnya. Kewarisan cucu laki-laki sama dengan kewarisan anak laki-laki. Ia dapat mewaris bersama dengan ahli waris yang dapat mewaris bersama anak laki-laki dan menutup orang yang ditutup oleh anak laki-laki.

(3) Ayah

Ayah sebagai ahli waris *ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Dengan kehadiran anak atau cucu laki-laki ayah hanya akan

menerima sebagai *dzawil furudl* sebesar 1/6. Ahli waris yang dapat mewaris bersama ayah sebagai *dzawil furudl* adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, suami atau istri.

(4) Kakek

Kakek berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah* bila dalam susunan ahli waris tidak ada anak atau cucu laki-laki dan tidak ada pula ayah. Pada umumnya kewarisan kakek sama dengan ayah, karena hak kewarisan kakek merupakan perluasan dari pengertian ayah. Oleh karena itu, kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah apabila ayah sudah meninggal lebih dahulu, baik sebagai ahli waris *dzawil furudl* atau *ashabah*. Ia akan menutup orang-orang yang ditutup oleh ayah dan dapat mewaris dengan orang-orang yang dapat mewaris bersama ayah.

Dalam keadaan tertentu kakek tidak berkedudukan sebagai ayah, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut (Amir Syarifudin, 2004: 236):

- (a) Kakek tidak menutup hak kewarisan saudara (menurut jumhur ulama), sedangkan ayah menutup kedudukan saudara kecuali menurut paham ulama Hanafiyah.
- (b) Kakek tidak dapat mengalihkan hak ibu dari sepertiga harta kepada sepertiga harta dalam kasus *gharawain*.
- (c) Menurut Ibnu Qudamah kakek tidak dapat menutup hak nenek (ibu dari ayah) karena keduanya sama berhak menerima warisan, kecuali menurut pendapat ulama Zhahiri dan Hanbali.

(5) Saudara kandung laki-laki

Saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris *ashabah* bila ia tidak mewarisi bersama anak atau cucu laki-laki dan tidak juga ayah. Saudara dapat mewarisi bersama kakek menurut jumhur ulama. Menurut ulama Hanafi dan Zhahiri, saudara tidak dapat mewaris bersama kakek, karena kakek dalam kedudukannya sebagai pengganti ayah menutup kedudukan saudara (Amir Syarifudin, 2004: 237).

Bila saudara kandung laki-laki sendirian, ia berhak atas semua harta dan bila ia bersama dengan ahli waris lain ia memperoleh sisa harta sesudah dibagikan

terlebih dahulu hak *dzawil furudl* yang ada. Jika saudara ada beberapa orang atau bersama dengan kakek mereka berbagi sama banyak. (Amir Syarifudin, 2004: 237).

(6) Saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki seayah berkedudukan sebagai *ashabah*, dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara kandung laki-laki. Ia dapat mewaris bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan dan saudara kandung perempuan dan saudara seayah perempuan yang bersama menjadi *ashabah bi ghairihi* bersama saudara seayah laki-laki.

Pada umumnya hak kewarisan saudara seayah laki-laki sama dengan kedudukan saudara kandung laki-laki, karena ia menempati kedudukan saudara kandung laki-laki, kecuali dalam hal :

- Saudara kandung laki-laki dapat mengajak saudara kandung perempuan menjadi ahli waris *ashabah bi ghairihi*, sedangkan saudara seayah laki-laki tidak dapat berbuat demikian.
- Saudara kandung laki-laki dapat berserikat dengan saudara seibu dalam kasus *musyarakah* sedangkan saudara seayah laki-laki tidak dapat.

(7) Anak saudara kandung laki-laki

Anak saudara kandung laki-laki dapat menjadi ahli waris *ashabah* bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung seayah laki-laki. Ia dapat mewaris bersama anak atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung atau seayah, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan. Kewarisan anak saudara kandung laki-laki adalah sebagaimana kewarisan saudara kandung laki-laki dalam segala bentuknya.

(8) Anak saudara seayah laki-laki

Anak saudara seayah laki-laki dapat menjadi ahli waris *ashabah* bila tidak mewarisi bersamanya anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah dan anak saudara laki-laki kandung. Ia dapat mewaris bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara

perempuan kandung atau seayah, suami atau istri, saudar seibu laki-laki atau perempuan.

(9) Paman kandung

Paman kandung adalah saudara kandung dari ayah. Paman kandung dapat menjadi ahli waris *ashabah* bila tidak mewarisi bersamanya anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah dan anak laki-laki dari saudara laki-kandung atau seayah. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami atau istri.

Bila ahli waris hanyalah paman sendirian, maka ia dapat mengambil semua harta dan bila ia bersama dengan ahli waris lain yang berhak ia mengambil sisa harta sesudah dibagikan hak ahli waris *dzawil furudh*. Jika ia ada beberapa orang, maka mereka berbagi sama banyak.

(10) Paman seayah

Paman seayah adalah saudara seayah dari ayah. Ia berhak atas warisan secara *ashabah* bila sudah tidak ada di antara ahli waris itu anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan paman kandung. Paman seayah bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami atau istri.

(11) Anak paman kandung

Anak paman kandung berhak atas warisan secara *ashabah* bila sudah tidak ada di antara ahli waris itu anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan paman kandung atau seayah. Bila ia sendiri, ia dapat mengambil semua harta, sedangkan bila ia bersama ahli waris lainnya yang berhak, ia mengambil sisa harta sesudah dibagikan kepada ahli waris. Bila ia ada beberapa orang, maka mereka berbagi sama banyak.

(12) Anak paman seayah

Anak paman seayah berhak atas warisan secara *ashabah* bila sudah tidak ada di antara ahli waris itu anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anak paman kandung pewaris . Paman seayah bersama anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, suami atau istri, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami atau istri. Bila ia sendiri, ia dapat mengambil semua harta warisan tersebut dan sedangkan bila ia bersama ahli waris lainnya yang berhak, ia mengambil sisa harta itu dan bila ia ada beberapa orang, maka mereka berbagi sama banyak.

b) Ashabah bi Ghairihi

Yang dimaksud dengan *ashabah bi ghairihi* disini adalah seseorang yang sebenarnya bukan ashabah karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi ashabah. Mereka sebagai *ashabah* berhak atas sisa harta bila hanya mereka yang menjadi ahli waris, atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *furudl* yang berhak. Kemudian di antara mereka berbagi dengan bandingan laki-laki mendapat sebanyak dua bagian perempuan (Amir Syarifudin, 2004: 243).

Ahli waris perempuan baru dapat diajak menjadi *ashabah* oleh saudara laki-lakinya bila ia sendiri adalah ahli waris yang berhak, jika tidak berhak maka keberadaan saudaranya itu tidak ada artinya. Seumpama anak saudara yang perempuan bukan ahli waris sedangkan anak saudara yang laki-laki atau saudara dari anak perempuan itu adalah *ashabah*. Dalam hal ini anak saudara yang laki-laki itu tidak berdaya untuk menolong saudaranya yang perempuan itu (Amir Syarifudin, 2004: 243).

Yang berhak menjadi ahli waris *ashabah bi ghairihi* itu adalah (Amir Syarifudin, 2004: 244):

- (1) Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Bila ahli waris hanya mereka berdua, keduanya mengambil semua harta dan bila ada ahli waris lain yang lain mereka mendapat sisa harta.

(2) Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki. Cucu perempuan itu dapat menjadi *ashabah* oleh laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berada satu tingkat di bawahnya. Jika ahli waris hanya mereka saja, maka mereka berhak atas seluruh harta, sedangkan jika bersama mereka ada ahli waris *furudl*, mereka mengambil sisa harta sesudah pembagian *dzawil furudl*.

(3) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung

Saudara perempuan kandung menjadi *ashabah* karena keberadaan saudara laki-laki kandung (saudara laki-lakinya) saat mewarisi harta. Bila ahli waris hanya mereka saja, keduanya mengambil semua harta dan bila ada ahli waris lain bersamanya, mereka mengambil sisa harta yang tinggal.

(4) Saudara seayah perempuan bersama saudara seayah laki-laki

Saudara seayah perempuan menjadi ahli waris *ashabah* bila diajak menjadi *ashabah* oleh saudaranya yang laki-laki. Ia mengambil seluruh harta bila ahli waris yang berhak hanyalah mereka berdua. Bila ada ahli waris lain yang mewarisi secara *dzawil furudl* maka mereka mengambil sisa harta yang tinggal.

c) Ashabah ma'a Ghairihi

Ashabah ma'a Ghairihi berarti *ashabah* karena bersama dengan orang lain. Orang yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi* itu sebenarnya bukan *ashabah*, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris lain yang juga bukan *ashabah*, ia dinyatakan sebagai *ashabah* sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *ashabah* itu tetap bukan *ashabah* (Amir Syarifudin, 2004: 247).

Ashabah ma'a Ghairihi khusus berlaku untuk saudara perempuan kandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris *furudl*, sedangkan saudara perempuan menjadi *ashabah*. Kasus khusus ini timbul pada waktu seseorang minta fatwa kepada Ibnu Mas'ud tentang ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Ibnu Mas'ud memutuskan berdasarkan apa yang dilihatnya dari Nabi yang menyelesaikan kasus yang sama, bahwa untuk anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$, untuk cucu

perempuan adalah 1/6 dan sisanya untuk saudara perempuan (Amir Syarifudin, 2004: 247).

3) Ahli waris dzawil arham

Ahli waris dzawil arham ialah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya ahli waris yang mempunyai hubungan family dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan waris dzawil furudl dan ashabah (Abdul Ghofur, 2002: 27).

Yang termasuk ahli waris dzawil arham ialah (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 27):

- a) Cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan
- b) Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
- c) Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah
- d) Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah)
- e) Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu)
- f) Paman, saudara laki-laki ibu
- g) Bibi, saudara perempuan ayah
- h) Bibi, saudara perempuan ibu
- i) Kakek, ayah ibu
- j) Nenek buyut, ibu kakek
- k) Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu

Tentang hak waris dzawil arham ini para ulama tidak sependapat, ada yang memasukkan mereka sebagai ahli waris dan ada yang tidak memasukkan. Di antara sahabat Nabi yang tidak memasukkan dzawil arham sebagai ahli waris adalah Zaid bin Tsabit, yang diikuti pula oleh para tabi'in seperti Sa'id bin Musayyah dan Sa'id bin Jubair. Ulama' Dhahiriyah, Imam Malik dan Imam dan Imam Syafi'I menganut pendapat ini (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 28).

Kebanyakan sahabat nabi memasukkan dzawil-arham sebagai ahli waris, seperti 'Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lain, yang diikuti pula oleh para tabi'in

seperti 'Alqamah, Syurah, Ibnu sirin, dan lain-lain. Iman Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan kebanyakan ulama menyokong pendapat ini. Ulama' mutakhir madzhab Maliki dan Syafi'I menganut pendapat ini juga (Afdol, 2003: 98).

Perbedaan pendapat tersebut terjadi oleh karena mengenai hak waris dzawil-arham ini tidak terdapat keterangan yang jelas dalam Al-qur'an maupun hadits-hadits Nabi. Pendapat pertama berpegang pada prinsip "apabila tidak ada dalil maka tidak ada hukum". Sedang pendapat kedua berpegang pada dalil Al-Qur'an yang meskipun tidak jelas, dapat difahamkan adanya isyarat yang bersifat umum, yang menyatakan bahwa sanak kerabat (ulul-arham) sebagian lebih utama dari sebagian yang lain menurut ketentuan Kitab Allah Qs. Al-Anfal : 75 (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 28).

Kecuali ayat tersebut ada lagi hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu daud dan Ibnu Majah yang mengajarkan bahwa paman (saudara laki-laki ibu) adalah waris bagi orang yang tidak mempunyai waris lainnya. Umar bin khattab pernah membagikan warisan kepada paman (saudara laki-laki ibu) seperti pernah diajarkan dalam hadits Nabi itu (Ahmad Azhar Basyir, 1999: 28).

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut. Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.

Setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, baik

secara fisik maupun secara perhitungan maka usaha selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk angka dan uang , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
2. Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris , baik yang ada di tempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan.
 - b. Kepastian syarat yang ditentukan seperti : apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak.
 - c. Kepastian tidak adanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris , dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris.
 - d. Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia *dihijab* secara *hijab hirman* oleh ahli waris yang ada bersamanya.
3. Memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau *dzaul furudh* atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias *ashabah* atau hanya sekedar *dzaul arham*.

Selanjutnya berlakulah langkah pembagian sebagai berikut :

1. Ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya ialah ahli waris *dzaul furudh*, karena orang yang berhak dan bagiannya telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an atau hadist Nabi. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhary dan Muslim dari Ibnu Abbas yang memerintahkan untuk memberikan harta kepada *dzaul furudh* yang disebutkan dalam Al-Qur'an terlebih dahulu dan kelebihanannya diberikan untuk kerabat laki-laki melalui laki-laki. Atas dasar hadist Nabi tersebut maka keharusan yang pertama adalah membagikan harta warisan untuk orang yang sudah pasti haknya itu.
2. Bila harta tidak terbagi habis di antara ahli waris *dzaul furudh* sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ada yang berhak atas sisa harta itu, maka kelebihan harta itu diberikan kepada ahli waris yang berhak atas sisa harta itu secara pembagian yang bersifat terbuka. Oleh golongan Ahlul Sunnah ahli waris sisa harta itu disebut ahli waris *ashabah* dan di kalangan ulama Syi'ah ahli waris sisa harta itu dinamakan *ahli waris kerabat*.
3. Bila harta tidak habis terbagi sedangkan ahli waris *ashabah* dan *ahli waris kerabat* tidak ada

pula, maka dalam penyelesaian kelebihan harta ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan mereka dalam hak kewarisan *dzaul arham*.

Menurut golongan ulama yang tidak menerima adanya kewarisan *dzaul arham*, maka sisa harta itu diserahkan ke baitul mal. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Syafi'I, kelompok mutakhir dari kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa baitul mal tidak terurus, maka kelebihan harta itu diselesaikan secara *radd*. Bila tidak mungkin diselesaikan secara *radd*, maka kelebihan harta itu baru diserahkan ke ahli waris *dzaul arham* (al-Mahalliy, III, hal: 137).

Bila pewaris tidak meninggalkan harta sama sekali (*dzawil furudl, ashabah, dzawil arham*), maka ia punah dalam arti sebenarnya. Tentang harta yang ditinggalkannya kita merujuk kepada hadist Nabi yang artinya : *saya menjadi ahli waris bagi yang tidak mempunyai ahli waris*. Dari hadist Nabi tersebut dapat dipahami bahwa Nabi memperoleh harta warisan dari orang-orang yang tidak mempunyai harta warisan sama sekali. Pengertian Nabi dalam hal ini bukan berarti ia sendiri yang berhak atas harta itu, tetapi adalah umat Islam atau kepentingan agama. Dari sinilah timbulnya pemikiran utama yang menempatkan "Islam" sebagai salah satu sebab adanya hubungan kewarisan (Amir Syarifudin, 2004: 293).

Hal yang demikian juga berlaku terhadap harta warisan dari pewaris yang hanya meninggalkan ahli waris *dzawil furudl* dan tidak meninggalkan ahli waris sisa harta, baik yang bernama ashabah menurut Ahlu Sunnah atau ahli waris kerabat menurut ulama Syi'ah dan harta yang tinggal itu tidak dapat pula diselesaikan secara *radd* seperti ahli warisnya hanyalah suami atau istri. Sisa harta dalam bentuk ini diserahkan kepada umat Islam atau untuk kepentingan Islam. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 191 yang bunyinya :

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *baitul mal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Amir Syarifudin, 2004: 293).

Selanjutnya siapa yang mengelola harta yang telah menjadi hak umat Islam tersebut? Dalam pengertian umum dikatakan bahwa harta umat Islam diserahkan ke baitul mal atau bendahara penyimpan harta (umat Islam). Yang jadi persoalan ialah bagaimana kalau di suatu

wilayah tidak ada baitul mal atau wujud baitul mal itu ada, namun tidak terurus, kemana harta itu diserahkan. Dalam keadaan tidak ada atau tidak teraturnya baitul mal, maka seluruh harta orang punah atau sisa harta yang tidak mungkin terbagi itu diserahkan untuk dikelola oleh badan atau lembaga pengelola harta umat Islam. UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa Badan Amil Zakat yang dibentuk Pemerintah di samping berfungsi sebagai penyimpan dan mengelola zakat, juga berhak menyimpan dan mengelola harta agama lainnya, termasuk harta warisan yang ada pihak yang berhak menerimanya (Amir Syarifudin, 2004: 294).

Penyesuaian

Dalam bahasan terdahulu telah dijelaskan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Apabila ahli waris *dzawil furudl* hanya seorang saja atau terdiri dari satu kelompok yang sama haknya, seumpama anak perempuan saja atau cucu perempuan saja, tidak ada persoalan yang timbul dalam pembagiannya. Bila ahli waris terdiri dari berbagai macam kelompok yang berbeda bagiannya, maka dalam penjumlahan bagian masing-masing dalam hubungannya dengan keseluruhan harta yang akan dibagikan kadang-kadang timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi menurut apa adanya. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian secara rasional. Penyesuaian ini diperlukan untuk dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian tersebut, dengan arti prinsip adil dan legal tetap diperhatikan (Amir Syarifudin, 2004: 295).

Hubungan jumlah seluruh bagian (*Furudl*) dengan jumlah keseluruhan harta yang akan dibagikan terdiri dari tiga kemungkinan (Amir Syarifudin, 2004: 296):

1. Jumlah seluruh pembagian (*furudl*) sesuai dan sama banyak dengan jumlah harta yang akan dibagikan sehingga seluruh harta sudah habis terbagi dan semua ahli waris mendapat bagiannya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.
2. Jumlah keseluruhan pembagian (*furudl*) melebihi jumlah harta yang akan dibagikan, sehingga setelah seluruh harta habis terbagi, di antara ahli waris ada yang belum menerima bagian yang ditentukan.
3. Jumlah seluruh bagian (*furudl*) lebih kecil dari jumlah seluruh harta, sehingga setelah seluruh ahli waris mendapat bagiannya sesuai dengan yang telah ditentukan, harta masih ada yang

belum terbagi.

C. Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Wasiat timbul sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, manusia selalu berusaha untuk berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup, salah satu amal kebaikan tersebut adalah membuat suatu wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain. Wasiat disini artinya ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Hal ini berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan yang bersangkutan dengan wasiat itu sendiri.

Sering terjadi bahwa seorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat, agar sepeninggalnya nanti harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya kepada istri supaya diberikan bagian berupa rumah dengan pekarangannya ; kepada anak laki-laki sulung diberikan bagian sawah, kepada anak perempuan diberikan bagian perhiasan dan seterusnya. Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan ahli waris nanti. Biasanya wasiat membagi-bagi harta warisan dengan cara tertentu itu dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesan orang tua. Apabila hal semacam itu terjadi, pada dasarnya tidak ada keberatan apapun ditinjau dari hukum Islam, asal harta barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah sesuai dengan ketentuan bagiannya dalam hukum waris. Sehingga mereka yang ternyata menerima lebih harus mengembalikan kelebihan itu kepada waris yang menerima barang seharga kurang dari ketentuan dari hukum waris Ahmad Azhar Basyir, 1999: 64)

Batas Wasiat

Wasiat merupakan pemindahan hak milik yang bersifat terbatas. Para ahli hukum Islam sepakat, bahwa batas wasiat adalah paling banyak adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta

peninggalan pewaris yang dapat diwasiatkan untuk diserahkan kepada orang lain, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui maka wasiat boleh diberikan lebih dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Dasar dari pendapat ini adalah hadist Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi Muhammad. Hadist itu adalah ucapan Rasulullah dalam dialog dengan Sa'ad bin Abi Waqash yang lagi sakit. Hadist itu berbunyi :

Sa'ad bin Abi Waqash bercerita bahwa sewaktu ia sakit parah dan Rasulullah mengunjunginya, ia bertanya kepada Rasulullah : "Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya ini?". Jawab Rasulullah: "Jangan!" Maka bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika seperdua?" Rasulullah menjawab lagi: "Jangan!" Sesudah itu bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika sepertiga?" Maka berkata Rasulullah: Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya, jika engkau tinggalkan anakmu dalam berkecukupan adalah lebih baik (Sayuti Thalib, 1982: 109)

Pemberian terbatas ini dimaksudkan agar jangan sampai merugikan ahli waris. Wasiat dilakukan oleh seseorang semasa ia masih hidup, ia dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas maupun terhadap harta yang masih samar, atau terhadap harta yang masih akan ada.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam hukum Islam wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan hukumnya wajib dilaksanakan. Dalam penerapannya wasiat itu harus didahulukan pelaksanaannya setelah harta peninggalan si pewaris atau si pewasiat digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Dalam pelaksanaannya harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau harta peninggalan jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga maka wasiat itu tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris dan pelaksanaannya diperlukan dua syarat berikut :

1. Dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sebab sebelum dia meninggal, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Apabila ahli waris memberikan izin pada saat pemberi wasiat masih hidup maka orang yang berwasiat boleh mencabut kembali wasiatnya apabila dia menginginkan. Apabila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat wafat maka wasiat itu dilaksanakan. Az Zuhri dan Rabi'ah berkata bahwa orang yang sudah wafat itu tidak akan menarik kembali wasiatnya.

2. Mempunyai kemampuan yang sah dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, pada saat memberikan izin. Jika orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kalangan pengikut Hanafi, Ishak, Syuraik dan Ahmad dalam satu riwayatnya membolehkan berwasiat lebih dari sepertiga. Sebab, dalam keadaan seperti ini orang yang berwasiat itu tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya dan juga karena wasiat yang ada didalam ayat tersebut adalah wasiat secara mutlak hingga dibatasi oleh hadits dengan “mempunyai ahli waris.” Dengan demikian, wasiat secara mutlak ini tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris (Fiqhus Sunnah juz IV hal 467 – 478 dalam (H:\WASIAT\wasiat-dalam-harta-warisan.htm)).

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa wasiat adalah wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, dan yang berhak memberikan wasiat adalah para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, dan yang dimaksud kerabat adalah orang-orang yang apabila dinasabkan, akan diketahui bahwa mereka berada pada garis keturunan yang sama dengan orang yang mati (H:\WASIAT\gdl.php.htm).

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan mengenai pembahasan masalah yang merupakan inti dari penulisan hukum yang disusun ini dengan judul Analisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Wasiat Dalam Islam

Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lainnya tergantung kondisinya, yaitu: bisa saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan itu akan dia-siakan, misalnya dia masih mempunyai utang zakat. Dapat pula sunnat apabila wasiat itu diperuntukkan bagi kebajikan, seperti wasiat kepada karib kerabat, pembangunan masjid, pembangunan madrasah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan perintah agama. Selain itu dapat juga hukumnya haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut dapat merugikan ahli waris, bahkan batal demi hukum. Dan juga dapat makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan terhadap harta tersebut.

2. Pembagian Warisan Dalam Islam

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Untuk memperjelas lagi proses pembagian harta warisan dalam kasus-kasus

kewarisan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Abdul Ghofur Anshori, 2002: 48) :

3. Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk angka dan uang , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
4. Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris , baik yang ada di tempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan.
 - b. Kepastian syarat yang ditentukan seperti : apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak.
 - c. Kepastian tidak adanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris , dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris.
 - d. Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia *dihijab* secara *hijab hirman* oleh ahli waris yang ada bersamanya.
5. Memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau *dzaul furudh* atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias *ashabah* atau hanya sekedar *dzaul arham*.

Selanjutnya berlakulah langkah pembagian sebagai berikut :

- a. Ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya ialah ahli waris *dzaul furudh*, karena orang yang berhak dan bagiannya telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an atau hadist Nabi. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhary dan Muslim dari Ibnu Abbas yang memerintahkan untuk memberikan harta kepada *dzaul furudh* yang disebutkan dalam Al-Qur'an terlebih dahulu dan kelebihanannya diberikan untuk kerabat laki-laki melalui laki-laki. Atas dasar hadist Nabi tersebut maka keharusan yang pertama adalah membagikan harta warisan untuk orang yang sudah pasti haknya itu.
- b. Bila harta tidak terbagi habis di antara ahli waris *dzaul furudh* sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ada yang berhak atas sisa harta itu, maka kelebihan harta itu diberikan kepada ahli waris yang berhak atas sisa harta itu secara pembagian yang bersifat terbuka. Oleh golongan Ahlul Sunnah ahli waris sisa harta itu disebut ahli

waris *ashabah* dan di kalangan ulama Syi'ah ahli waris sisa harta itu dinamakan *ahli waris kerabat*.

- c. Bila harta tidak habis terbagi sedangkan ahli waris *ashabah* dan *ahli waris kerabat* tidak ada pula, maka dalam penyelesaian kelebihan harta ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan mereka dalam hak kewarisan *dzawl arham*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 191 :

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *baitul mal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Amir Syarifudin, 2004: 293).

3. Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Pandangan Hukum Islam

Wasiat atau surat wasiat atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut dengan testament mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal pembagian harta warisan. Wasiat seseorang yang telah meninggal harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam pembagian harta warisan. Allah menyebutkan wasiat lebih dahulu dilaksanakan daripada utang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran hutang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini adalah wasiat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan. Karena utang menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya.

B. Saran

1. Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang tidak berhak menerima peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaaan harta itu. Atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya system wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi. Oleh karena masih sedikitnya buku,

artikel, dan lain sebagainya yang mengatur tentang wasiat itu, maka sekiranya perlu bagi orang-orang terutama umat muslim mengkaji lebih dalam lagi mengenai surat wasiat terutama kaitannya dengan pembagian harta warisan.

2. Kurang kepedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak kita pungkiri, terutama manusia jaman sekarang banyak mengabaikan ilmu faraid. Kurangnya kepedulian umat Islam terhadap ilmu ini sering menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga. Di samping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan ketidaktahuan manusia terutama ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya. Oleh karena itu maka Ilmu Faraid atau Hukum Kewarisan Islam itu sangat penting untuk dikaji, dipahami, dipelajari dan dilaksanakan oleh umat Islam agar tidak terjadi perpecahan keluarga, terutama dengan masalah yang menyangkut harta warisan dan wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Ekonosia.
- Abdullah Siddik.1984. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta : Wijaya.
- Abdul Manan dan Drs.M.Fauzan . 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Abidin. 1966 , dalam bukunya Ali Afandi . 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT.Bina Aksara.
- _____. 1966 , dalam bukunya Amir Syarifudin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Abu Zahrah. 1957, dalam bukunya Ali Afandi . 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT.Bina Aksara.
- Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Kewarisan Islam Secara Adil*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Waris Islam*. Jogjakarta : Penerbit Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____, 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali Afandi . 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT.Bina Aksara.
- Amir Syarifudin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media.
- A. Pitlo, dalam Isa Marief. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermasa.
- Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K.Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Medan : Pustaka Sinar Grafika.
- Hasballah Thaib. 1992. *Hukum Benda Menurut Islam*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
- H.B. Jassin. 1991. *Bacaan Mulia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.

Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M.Ali Ash Shabuniy. 1961. *Hukum Waris Islam*. Surabaya : Al Ikhlas.

M.Ali Hasan. 2002. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

M.Ali sayis. 1953. *Hukum Waris Islam*. Surabaya : Al Ikhlas

Otje Salman, dan Mustafa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung : Rafika Aditama

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sayid Sabiq. 1988. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Al-Ma'arif.

-----, 1990. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Al-Ma'arif.

Sayuti Thalib. 1984. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT.Bina Aksara.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

T.M.Hasby ash-Shiddieqy. 1988. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta : PT Mudah.

Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : Sumur.

Kitab dan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) Buku Kedua Bab XIII Tentang Surat Wasiat

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Internet

<http://hak-opsi-dalam-penyelesaian-hukum-waris-di-pengadilan-negeri-studi-kasus-di->

[pengadilan-negeri-sle.htm](#) (diakses tanggal 20 Maret 2009 , Pukul 12:33 WIB)

[http:\ WASIAT\15_BeberapaPertanyaanSeputarHartaWarisan.htm](#) (diakses tanggal 19 Agustus 2009, Pukul 19.03 WIB)

[http:\ WASIAT\wasiat-dalam-harta-warisan.htm](#) (diakses tanggal 19 Agustus 2009, Pukul 19.15 WIB)

[http:\WASIAT\achmad-yani-s.html](#) (diakses tanggal 13 Agustus 2009, Pukul 19.15 WIB)

